

Analisis Peran Struktur Signifikasi dan Dominasi dalam Peningkatan Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini

Chairunnisa Julfadlina

Chairunnisa.julfadlina@ui.ac.id

Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Received: 2nd February 2025

Accepted: 3rd March 2025

Published: 16th March 2025

Abstract: *The participation of children in early childhood education (PAUD) schools, measured by the PAUD Participation Rate (APK PAUD) in Indonesia, remains very low, ranging from 35 to 40 percent. Data released by BPS shows that over eight years, from 2015 to 2023, the APK PAUD in Indonesia has only increased by about one percent. This study analyzes the APK PAUD achievements by province and examines the relationship between signification structure and domination structure with APK PAUD using Anthony Giddens' structuration theory to see how agency is influenced by these structures in improving APK PAUD. A quantitative approach with secondary data is used in this research, and the unit of analysis is each province in Indonesia. Due to the type and distribution of data, the Spearman correlation test was chosen to examine the relationship between structure and agency. The results indicate that the signification structure, which consists of parental education and family harmony, as well as the economic conditions from the domination structure, do not have a relationship with APK PAUD. In contrast, two variables from the domination structure, which include the availability of school facilities and access to schools, are related to APK PAUD. The availability of school facilities has a weak and positive relationship with APK PAUD, while access to schools has a weak and negative relationship with APK PAUD.*

Keyword: *Agency, Significance structure, Domination structure, APK, PAUD.*

Abstrak: *Partisipasi anak-anak pada sekolah PAUD yang diukur menggunakan APK PAUD di Indonesia masih sangat rendah hanya berkisar pada angka 35-40 persen. Data yang dirilis BPS menunjukkan selama delapan tahun, 2015-2023, APK PAUD di Indonesia hanya mengalami peningkatan sekitar satu persen. Penelitian ini menganalisis capaian APK PAUD per provinsi dan menguji hubungan struktur signifikasi dan struktur dominasi dengan APK PAUD menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens untuk melihat bagaimana agensi dipengaruhi oleh struktur tersebut dalam meningkatkan APK PAUD. Pendekatan kuantitatif dengan data sekunder digunakan dalam penelitian ini dan unit analisis yang digunakan adalah masing-masing provinsi di Indonesia. Karena tipe dan sebaran data, uji korelasi Spearman dipilih untuk menguji hubungan antara struktur dan agensi. Hasilnya struktur signifikasi yang terdiri dari pendidikan orang tua dan keharmonisan keluarga serta kondisi ekonomi dari struktur dominasi tidak memiliki hubungan dengan APK PAUD, sedangkan dua variabel dari struktur dominasi yang terdiri dari ketersediaan fasilitas sekolah, dan akses ke sekolah memiliki hubungan dengan APK PAUD. Ketersediaan fasilitas sekolah memiliki hubungan lemah dan positif terhadap APK PAUD, sedangkan akses ke sekolah memiliki hubungan yang lemah dan negatif dengan APK PAUD.*

Kata Kunci: *Agensi, Struktur signifikasi, Struktur Dominasi, APK, PAUD.*

How to cite this article:

Julfadlina, C. (2025). Analisis Peran Struktur Signifikansi dan Dominasi dalam Peningkatan Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 10(1), 108–120. <https://doi.org/10.33369/jip.10.1.108-120>

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bagi masa depan suatu negara. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara merupakan representasi dari proses tumbuh kembangnya pada masa anak-anak (Annisa dkk., 2022). Melatih kecakapan hidup sejak anak-anak berada pada usia dini berpengaruh terhadap kesuksesannya di masa depan (Supartini dkk., 2024). Oleh karena itu, untuk menciptakan SDM negara yang berkualitas, pemerintah harus mempersiapkan proses tumbuh kembang dan kecakapan hidup anak secara optimal. Investasi pada pendidikan dan kesehatan anak-anak tidak hanya akan bermanfaat bagi individu anak, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Anak-anak yang tumbuh dan berkembang serta memiliki kecakapan hidup yang baik menjadi anak-anak yang akan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan dan berkontribusi pada negara.

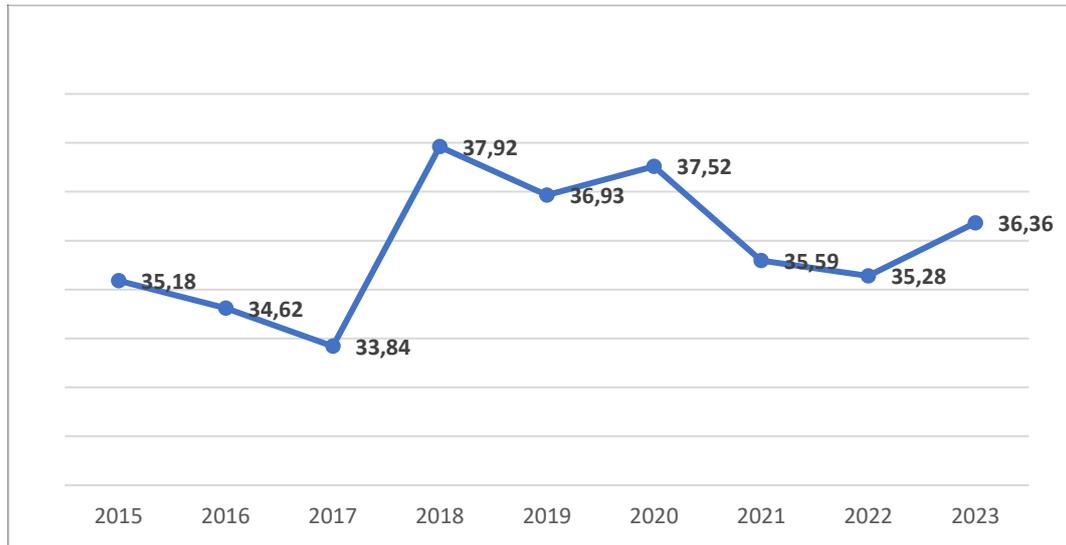
Masalah tumbuh kembang anak merupakan isu global, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sekitar 250 juta atau 43 persen anak-anak di negara-negara tersebut terancam tidak akan dapat mengoptimalkan perkembangannya (Britto dkk., 2017). Oleh karena itu, PBB memberi perhatian serius pada masalah ini dengan menetapkan tumbuh kembang anak dalam target *Sustainable Development Goals* (SDGs), tepatnya adalah target 4.2 yang memastikan pada tahun 2030 seluruh anak baik laki-laki maupun perempuan memiliki akses yang sama terhadap perkembangan, pengasuhan, dan pendidikan anak usia dini yang berkualitas sehingga mereka mampu menempuh pendidikan dasar (Bappenas, t.t.).

Sejalan dengan tujuan SDGs, pemerintah Indonesia juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tumbuh kembang anak usia dini. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pendidikan anak usia dini termasuk salah satu jenjang pendidikan yang diatur dalam UU tersebut. Komitmen ini diperkuat dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Perpres ini bertujuan untuk menciptakan pengembangan anak usia dini secara menyeluruh dan terintegrasi dengan memperhatikan semua aspek dan menekankan pentingnya kerja sama dari berbagai pihak.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang bagi negara melalui optimalisasi tumbuh kembang anak. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, PAUD merupakan upaya pembinaan anak-anak sejak lahir hingga usia enam tahun melalui berbagai metode pendidikan untuk merangsang tumbuh kembangnya dalam mempersiapkan diri masuk dalam jenjang pendidikan berikutnya. Melalui sekolah PAUD, anak-anak akan mendapatkan stimulasi kognitif yang dapat mempengaruhi kesiapannya dalam mengikuti jenjang pendidikan berikutnya (Handayani & Rinaldi, 2024). Anak-anak yang mengikuti sekolah PAUD memiliki kesiapan lebih tinggi dalam mengikuti pendidikan dasar (Nakajima dkk., 2019). Selain itu, anak-anak yang mendapatkan pendidikan dan pengasuhan pada usia dini juga memiliki hasil kognitif dan sosial yang lebih baik (Kusumawardhani, 2022).

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur peran PAUD adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Indikator ini menggambarkan daya serap PAUD bagi anak-anak usia dini (BPS, 2017). Dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai tantangan untuk meningkatkan partisipasi anak-anak dalam sekolah PAUD atau APK PAUD. Pemerintah telah

menetapkan target melalui RPJMN 2020-2024, yaitu 72,27 persen anak kelas satu SD/MI/SDLB adalah anak-anak yang pernah sekolah PAUD. Akan tetapi, pada kenyataannya partisipasi anak-anak Indonesia dalam sekolah PAUD masih sangat rendah. Sejak dirilis pada tahun 2015 sampai tahun 2023, APK PAUD masih sangat rendah, hanya mencapai 35-40 persen. Hanya Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Gorontalo yang berhasil mencapai APK PAUD di atas 50 persen. Hal ini menunjukkan penetapan berbagai target dan regulasi pemerintah masih belum dapat meningkatkan APK PAUD secara signifikan, khususnya selama periode 2015-2023.



Sumber : Diolah dari (BPS, 2024b)

Gambar 1. Perkembangan APK PAUD Indonesia, 2015-2023

Analisis terhadap faktor penyebab rendahnya APK PAUD perlu dilakukan sebagai landasan membuat kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah ini. Beberapa penelitian telah melakukan analisis terhadap hal tersebut. Penelitian di Riau menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi sekolah PAUD, yaitu ketersediaan fasilitas sekolah dan orang tua yang lebih memilih *homeschooling* (Eriani & Yolanda, 2022). Minimnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya partisipasi anak dalam PAUD juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi PAUD di wilayah pedesaan Indonesia (Mulia & Kurniati, 2023). Selain itu, faktor kondisi sosial ekonomi keluarga juga mempengaruhi partisipasi sekolah PAUD di beberapa wilayah (Rasyid, 2015; Takerubun & Marsino, 2021).

Meskipun berbagai penelitian telah mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya partisipasi sekolah PAUD, tetapi masih terbatas pada satu atau beberapa wilayah belum mencakup keseluruhan wilayah di Indonesia. Penelitian yang menganalisis APK PAUD secara keseluruhan di Indonesia telah dilakukan, tetapi terbatas hanya menggambarkan kondisi APK PAUD tanpa menjelaskan faktor-faktor penyebabnya (Rohmani, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Selain menganalisis APK PAUD secara makro yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, penelitian ini juga akan menganalisis faktor apa saja yang berhubungan dengan peningkatan APK PAUD.

Penelitian ini menggunakan teori strukturasi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens agar dapat melihat secara komprehensif faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi sekolah PAUD. Anthony Giddens mengusulkan konsep "*duality of structure*" yaitu struktur dan agensi saling membentuk dalam proses yang kompleks (Clegg & Cunha, 2019). Agensi dalam

penelitian ini adalah orang tua, khususnya tindakan orang tua untuk mendaftarkan anaknya pada sekolah PAUD yang secara langsung mempengaruhi besaran APK PAUD. Tindakan agensi ini dibentuk atau dipengaruhi oleh berbagai struktur. Struktur yang dimaksud adalah berbagai hal yang mempengaruhi partisipasi sekolah PAUD seperti pendidikan orang tua, keharmonisan keluarga, kondisi ekonomi, ketersediaan dan akses ke sekolah PAUD. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi interaksi antara struktur dan agensi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dan inferensial karena akan menggambarkan capaian APK PAUD di Indonesia saat dan melakukan uji korelasi antara variabel bebas dan terikat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dirilis oleh BPS, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Data merupakan hasil dari berbagai registrasi, sensus, dan survei yang dilakukan oleh instansi-instansi tersebut. Periode data yang digunakan disampaikan secara detail pada tabel 1. Unit analisis dalam penelitian ini adalah provinsi sehingga seluruh data yang disajikan adalah data-data makro capaian masing-masing provinsi bukan data individu.

Tabel 1. Konsep, Variabel, dan Indikator yang Digunakan dalam Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Alasan
Agensi	Tindakan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di PAUD	APK PAUD (Tahun 2023, sumber BPS)	Menggambarkan partisipasi sekolah PAUD anak usia dini
Struktur Signifikasi	Pendidikan Orang Tua	Rata-rata lama sekolah (Tahun 2023, sumber BPS)	Menggambarkan capaian pendidikan yang ditempuh oleh penduduk di suatu wilayah
	Keharmonisan Keluarga	Persentase jumlah perceraian (Tahun 2023, Kolaborasi data BPS dan Kemendagri)	Keterbatasan ketersediaan data menjadikan variabel ini hanya diwakili oleh indikator ini.
Struktur Dominasi	Kondisi Ekonomi	Persentase Penduduk Miskin (Tahun 2023, sumber BPS)	Menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat
	Ketersediaan fasilitas sekolah	Rasio jumlah PAUD per desa (Jumlah PAUD data dari Kemendikdasmen, Jumlah Desa data 2021 dari BPS)	Menggambarkan ketersediaan sekolah PAUD di suatu provinsi
	Akses menuju ke sekolah	Persentase desa tertinggal (Tahun 2023, sumber BPS)	Desa tertinggal merupakan ukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu desa berdasarkan beberapa kriteria seperti akses ke desa tersebut, termasuk akses ke sarana prasarana umum termasuk di dalamnya sekolah-sekolah.

Terdapat 5 variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Indikator untuk setiap variabel disesuaikan dengan ketersediaan data BPS, Kemendagri, dan Kemendikdasmen. Rincian variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada tabel 1.

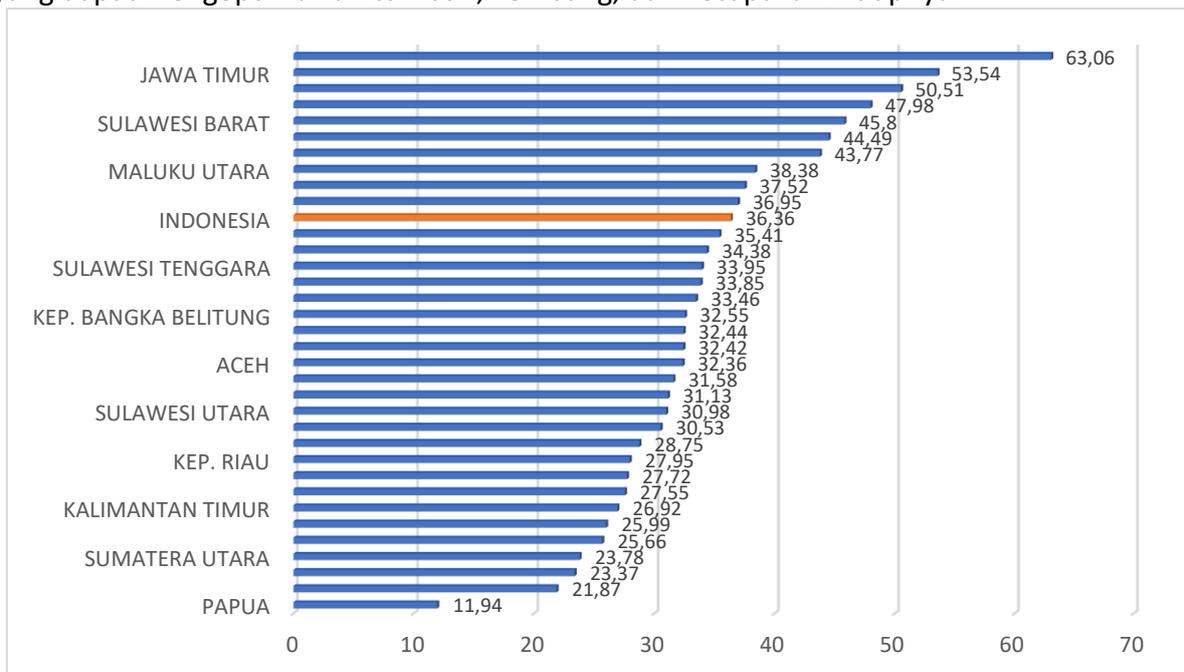
Validitas dan Reliabilitas tidak diuji lagi dalam instrumen penelitian ini karena menggunakan data sekunder dari berbagai instansi yang telah melakukan uji tersebut sebelum melakukan pengumpulan data di lapangan. Tipe, sebaran data, dan pemenuhan asumsi dasar menentukan dalam penentuan uji statistik yang digunakan. Penelitian ini menggunakan uji korelasi *Spearman* untuk menganalisis hubungan antara APK PAUD dan variabel lain karena disesuaikan dengan tipe data yang ordinal, dan tidak terpenuhinya asumsi linearitas dan normalitas sebaran data (Sedgwick, 2014). Nilai signifikan dari hasil uji korelasi *Spearman* digunakan untuk menentukan variabel yang berkorelasi dengan APK PAUD, sedangkan koefisien korelasi digunakan untuk melihat arah dan kekuatan hubungan antar variabel.

Penelitian kuantitatif ini terbatas pada menggambarkan kondisi APK PAUD beserta faktor-faktor yang berhubungan dengannya secara makro tidak lebih dalam menggali keadaan hingga level individu. Penggunaan data sekunder menimbulkan keterbatasan dalam pemilihan indikator dalam penelitian ini, sehingga tidak semua variabel yang relevan dapat diuji dalam penelitian ini. Indikator yang terpilih telah diupayakan paling menggambarkan kelima variabel tersebut. Sifat sebaran data yang tidak normal juga membatasi penelitian ini hanya menggunakan uji nonparametrik untuk melihat hubungan antara APK PAUD dan variabel lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

APK PAUD

APK PAUD merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak usia dini yang sekolah di PAUD (BPS, 2017). Semakin tinggi APK PAUD menunjukkan semakin banyak anak-anak usia dini yang dapat mendapatkan berbagai metode pendidikan di PAUD yang dapat mengoptimalkan tumbuh, kembang, dan kecapan hidupnya.



Sumber : (BPS, 2024b)

Gambar 2. APK PAUD Menurut Provinsi di Indonesia, Tahun 2023

Gambar 1 menunjukkan APK PAUD di Indonesia cukup fluktuatif sejak tahun 2015 hingga 2023. Tahun 2023, APK PAUD di Indonesia masih berada pada angka 36,36 persen, meningkat 1,08 persen dibandingkan tahun 2022. Capaian PAUD ini masih sangat kecil karena tidak mencapai 50 persen dan peningkatannya tidak signifikan. Bahkan, jika dibandingkan kondisi pada tahun 2015, peningkatannya juga masih berkisar pada satu persen saja.

Jika dibandingkan capaian APK PAUD antar masing-masing provinsi, sebagian besar provinsi capaiannya masih berada di bawah angka nasional. Papua merupakan provinsi dengan capaian paling rendah yaitu 11,94 persen, dan DI Yogyakarta merupakan yang tertinggi yaitu 63,06 persen.

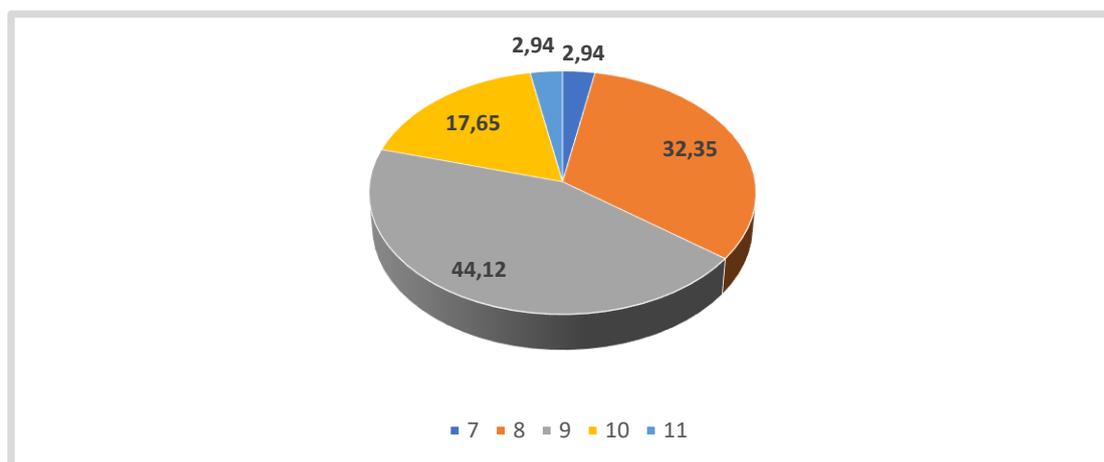
Agensi

Agensi merupakan konsep dasar dalam teori strukturasi, yaitu sejauh mana agen sosial melakukan tindakan yang didasarkan pada pengetahuan maupun keyakinannya (Clegg & Cunha, 2019). Agen sosial dalam penelitian ini adalah orang tua dan tindakan yang dimaksud adalah partisipasi dalam sekolah PAUD yang diukur melalui APK PAUD. Para agen dipengaruhi struktur dalam melakukan tindakan tertentu. Selain itu, agen juga dapat mempengaruhi struktur. Akan tetapi, dalam penelitian ini terbatas pada pembahasan bagaimana tindakan agen dipengaruhi oleh berbagai struktur yang ada.

Anthony Giddens membagi struktur menjadi tiga, yaitu struktur signifikasi, legitimasi, dan dominasi (Clegg & Cunha, 2019). Karena keterbatasan data, penelitian ini hanya membahas interaksi antara struktur signifikasi dan dominasi dengan agensi.

Struktur Signifikasi

Struktur adalah hal-hal yang tidak selalu terlihat secara virtual, tetapi juga hadir dalam "jejak memori" yang diwujudkan dalam tindakan sosial dan dapat direproduksi atau diubah melalui praktik sosial (Clegg & Cunha, 2019). Struktur signifikasi adalah struktur yang berkaitan dengan simbol-simbol dan makna yang membentuk persepsi sosial. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan untuk mewakili struktur signifikasi, yaitu pendidikan orang tua dan keharmonisan keluarga.



Sumber : Diolah dari (Kemendagri, 2023)

Gambar 3. Persentase Provinsi Menurut Rata-rata Lama Sekolah

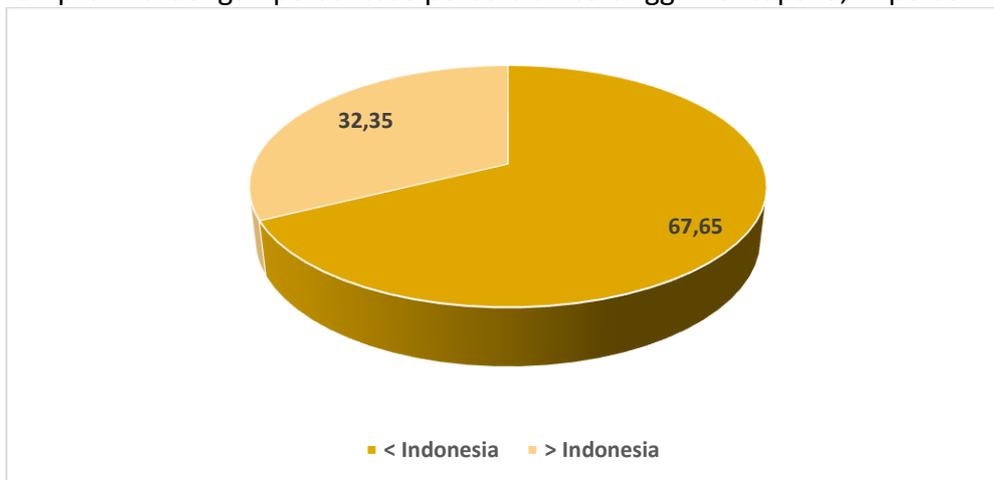
Pendidikan orang tua merupakan hal yang penting untuk mengatasi masalah perkembangan anak (Britto dkk., 2017). Orang tua dengan pendidikan yang baik diasumsikan memiliki pemahaman yang jauh lebih baik mengenai perkembangan anak dan pentingnya partisipasi sekolah, khususnya sekolah PAUD. Pemahaman yang baik mengenai pentingnya partisipasi sekolah PAUD meningkatkan kemungkinan anaknya akan bersekolah di PAUD dan

secara langsung mempengaruhi besaran APK PAUD. Hasil penelitian di daerah pedesaan Indonesia, minimnya pemahaman orang tua terkait pentingnya PAUD menyebabkan rendahnya partisipasi anak-anak di sekolah PAUD (Mulia & Kurniati, 2023). Indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan orang tua adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS adalah jumlah tahun yang ditempuh penduduk 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (Kemendagri, 2023).

Gambar 3 menunjukkan bahwa RLS penduduk di atas 25 tahun di Indonesia mayoritas, 44,12 persen, adalah 9 tahun yang artinya hanya dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP/SLTP. Tidak ada provinsi yang memiliki RLS 12 tahun yang artinya rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atasnya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA/SLTA. Hanya satu atau 2,94 persen provinsi yang RLS penduduknya mencapai 11 tahun dan itu adalah DKI Jakarta. Papua merupakan satu-satunya provinsi yang RLS penduduknya paling rendah yaitu hanya 7 tahun. Hal ini menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi antara DKI Jakarta dan Papua.

Selain pendidikan, kohesi keluarga merupakan hal yang penting dan berpengaruh terhadap perkembangan anak (Barber & Buehler, 1996). Keluarga yang memiliki hubungan erat dan saling mendukung akan membuat anak-anak lebih bahagia dan sehat secara mental. Kohesi keluarga atau keharmonisan keluarga juga mempengaruhi pengambilan keputusan penting dalam keluarga (Dutot dkk., 2022). Implikasi dalam penelitian ini adalah kohesi atau keharmonisan keluarga dapat mempengaruhi keluarga mengambil keputusan partisipasi anaknya di sekolah PAUD. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan kohesi atau keharmonisan keluarga adalah rasio antara perceraian dan jumlah keluarga. Perceraian diasumsikan sebagai hal yang menggambarkan keluarga yang tidak harmonis.

Pada tahun 2023, 408.347 perceraian terjadi di Indonesia (BPS, 2024). Jika dibandingkan dengan jumlah keluarga yang dicatat oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu 90.644.991 keluarga (Kemendagri, 2023), maka persentase perceraian di Indonesia adalah 0,45 persen. Jika dibandingkan dengan angka tersebut, persentase provinsi yang memiliki persentase perceraian di bawah angka nasional adalah 67,65 persen, sedangkan sisanya 32,35 persen memiliki persentase perceraian di atas angka nasional. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan persentase perceraian terendah, yaitu 0,03 persen, dan Gorontalo merupakan provinsi dengan persentase perceraian tertinggi mencapai 5,22 persen.

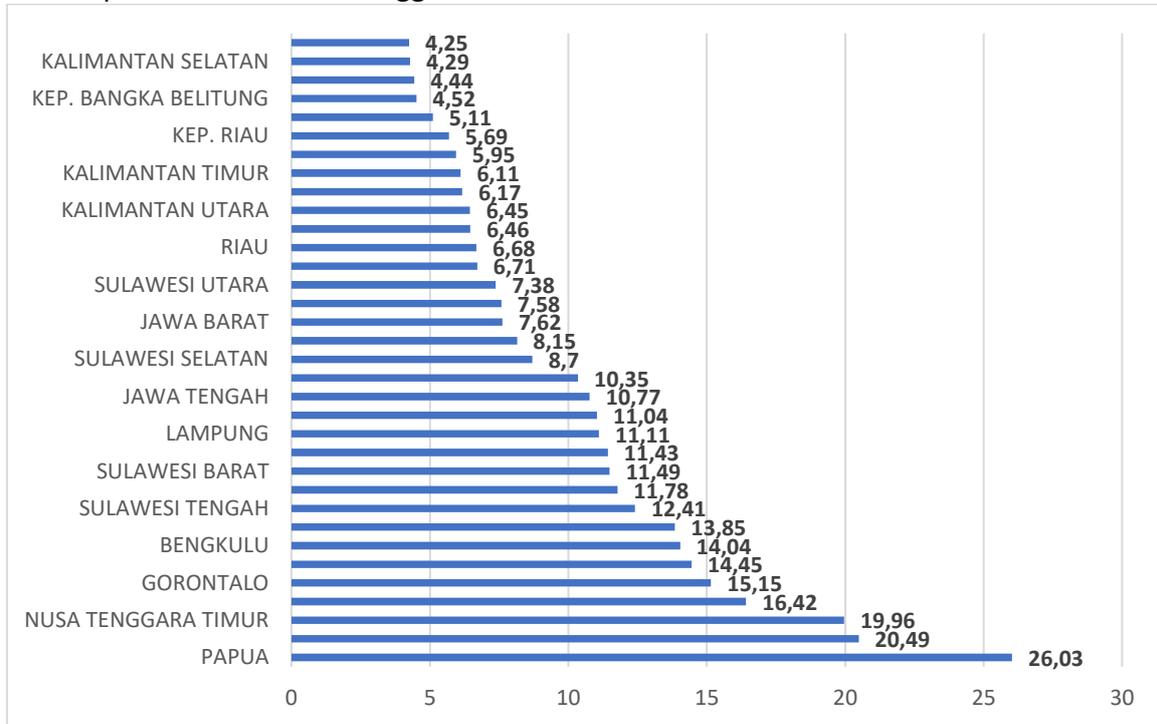


Sumber : Diolah dari (BPS, 2024) dan (Kemendagri, 2023)

Gambar 4. Persentase Provinsi Menurut Persentase Perceraian

Struktur Dominasi

Struktur dominasi merupakan hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya dan kekuatan (Clegg & Cunha, 2019). Dalam penelitian ini, struktur ini diinterpretasikan melalui beberapa variabel, yaitu kondisi ekonomi, ketersediaan fasilitas sekolah PAUD, dan akses ke sekolah PAUD. Kondisi ekonomi menggunakan indikator persentase penduduk miskin, ketersediaan fasilitas menggunakan indikator jumlah PAUD per desa, dan akses ke sekolah menggunakan indikator persentase desa tertinggal.



Sumber : diolah dari (BPS, 2025)

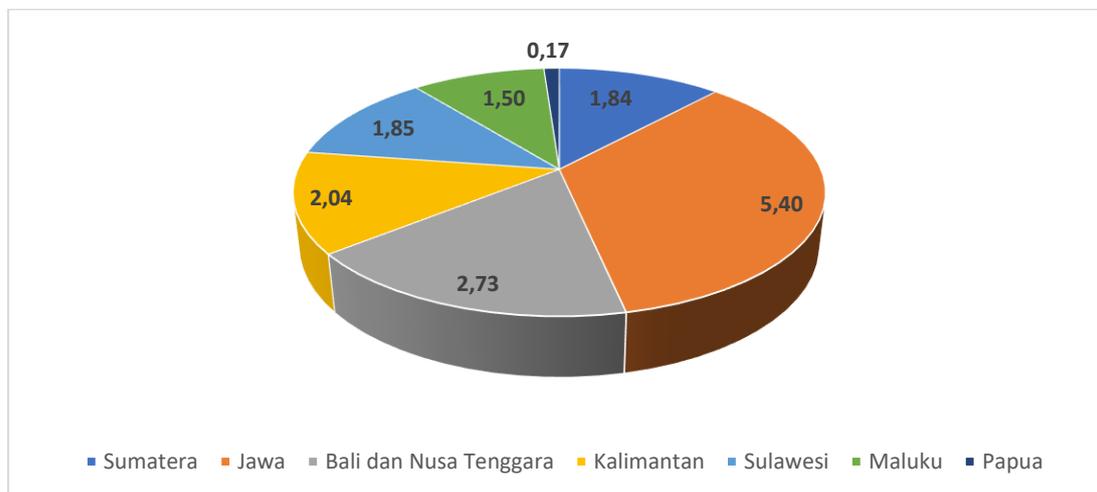
Gambar 5. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia, Semester I Tahun 2023

Kondisi ekonomi keluarga merupakan salah satu hal yang dapat dikaitkan dengan partisipasi belajar anak (Paramita dkk., 2014). Hubungan antara kondisi ekonomi dan partisipasi belajar adalah positif, yang artinya semakin baik kondisi ekonomi keluarga maka partisipasi belajar pada anak juga akan semakin baik. Karena APK PAUD menggambarkan kondisi partisipasi sekolah PAUD menurut provinsi, maka indikator yang digunakan untuk menilai kondisi ekonomi adalah indikator yang mencerminkan perekonomian suatu provinsi, yaitu Persentase Penduduk Miskin.

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan nasional, maka persentase penduduk miskin merupakan jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk (BPS, 2024). Indikator ini dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat suatu provinsi. Semakin besar nilai indikator ini menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat di provinsi tersebut tidak baik. Pada semester satu tahun 2023, Bali merupakan provinsi dengan kemiskinan paling rendah yaitu hanya 4,52 persen. Papua dan Papua Barat adalah provinsi dengan kemiskinan paling tinggi yang mencapai lebih dari 20 persen.

Kondisi ekonomi yang baik tidak akan optimal jika tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas dalam meningkatkan partisipasi sekolah (Khairunnisa dkk., 2014). Menyadari hal ini, pemerintah mengulus program satu desa satu PAUD untuk mendukung peningkatan

partisipasi sekolah PAUD (Kementerian Dalam Negeri, 2019). Indikator yang digunakan pada variabel ketersediaan fasilitas sekolah PAUD ini adalah rasio jumlah PAUD per desa pada setiap provinsi. Jika dibandingkan antar pulau yang ada di Indonesia, Pulau Papua merupakan satu-satunya pulau yang belum memenuhi program satu desa satu PAUD, sedangkan pulau yang lainnya telah memenuhi program tersebut.



Sumber : Diolah dari (Kemendikdasmen, 2025) dan (BPS, 2024a)

Gambar 6. Rasio Jumlah PAUD dan Jumlah Desa Menurut Pulau di Indonesia, Tahun 2023

Selain ketersediaan sekolah, akses menuju ke sekolah tersebut juga mempengaruhi tindakan orang tua dalam memasukkan anaknya ke sekolah PAUD. Semakin mudah akses menuju sekolah diasumsikan akan semakin meningkatkan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Indikator yang digunakan untuk menginterpretasikan variabel ini adalah persentase desa tertinggal.

Daerah tertinggal merupakan daerah dengan perkembangan yang lebih lambat dibandingkan daerah lain secara nasional (Kemendes, 2020). Beberapa kriteria yang digunakan adalah aksesibilitas dan sarana prasarana. Semakin banyak provinsi yang memiliki desa dengan kriteria desa tertinggal, maka akan semakin sulit aksesnya dan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki termasuk fasilitas umum seperti sekolah. Lima provinsi dengan persentase tertinggal terbanyak adalah Papua, Papua Barat, Kalimantan Utara, Maluku, dan Sumatera Utara.

Uji Korelasi *Spearman*

Uji korelasi *Spearman* dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel-variabel yang telah dipilih dengan APK PAUD di Indonesia. Dengan mengetahui variabel yang berhubungan dengan APK PAUD, pemerintah maupun masyarakat dapat memberikan berbagai intervensi pada variabel tersebut untuk meningkatkan APK PAUD.

Tabel 2 menunjukkan seluruh variabel pada struktur signifikansi tidak memiliki hubungan dengan APK PAUD. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memastikan hasil temuan ini dengan menambahkan berbagai variabel lain yang dapat seperti peran kebijakan atau regulasi pemerintah dan peran media dalam mensosialisasikan pentingnya partisipasi anak-anak di dalam PAUD. Kondisi ekonomi, variabel dari struktur dominasi juga tidak memiliki hubungan dengan APK PAUD. Variabel lain dari struktur dominasi, ketersediaan fasilitas dan akses menuju sekolah, memiliki hubungan dengan APK PAUD. Hal ini menunjukkan bahwa sumber

daya sekolah lebih memiliki hubungan dibandingkan dengan sumber daya ekonomi. Kekuatan hubungan antara ketersediaan fasilitas sekolah dan akses menuju sekolah dengan APK PAUD digambarkan oleh koefisien dari hasil uji korelasi *Spearman*. Kedua variabel menunjukkan hubungan yang lemah karena koefisien korelasinya kurang dari 50 persen. Arah hubungan antar variabel ditunjukkan oleh tanda dari koefisien. Ketersediaan fasilitas sekolah memiliki tanda positif yang menunjukkan semakin banyak sekolah PAUD yang tersedia di suatu wilayah akan meningkatkan besaran APK PAUD. Akses menuju fasilitas sekolah yang diwakili indikator persentase desa tertinggal memiliki tanda negatif yang menunjukkan semakin besar persentase desa tertinggal di suatu provinsi, maka besaran APK PAUD akan semakin kecil.

Tabel 2. Hasil Uji Korelasi *Spearman*

Konsep	Variabel	Signifikansi	Koefisien	Keterangan
Struktur Signifikasi	Pendidikan Orang Tua	0,215	-0.218	Tidak memiliki hubungan dengan APK PAUD
	Keharmonisan Keluarga	0,118	0,273	Tidak memiliki hubungan dengan APK PAUD
Struktur Dominasi	Kondisi Ekonomi	0,966	0,007	Tidak memiliki hubungan dengan APK PAUD
	Ketersediaan fasilitas sekolah	0,51	0,338	Memiliki hubungan dengan APK PAUD menggunakan α 0,10
	Akses menuju ke sekolah	0,40	-0,354	Memiliki hubungan dengan APK PAUD menggunakan α 0,10

Sumber: diolah penulis

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan dua dari lima variabel yang diuji memiliki hubungan dengan APK PAUD. Kedua variabel tersebut adalah ketersediaan fasilitas dan akses menuju ke fasilitas tersebut. Ketersediaan fasilitas pendidikan memiliki hubungan yang positif yang menunjukkan semakin banyak fasilitas sekolah PAUD tersedia di suatu wilayah, maka APK PAUD juga akan semakin meningkat. Akses menuju fasilitas sekolah yang diwakili oleh variabel persentase desa tertinggal memiliki hubungan negatif dengan APK PAUD yang menunjukkan semakin sedikit desa tertinggal di suatu provinsi, maka APK PAUD akan semakin meningkat. Kondisi ekonomi, pendidikan orang tua, dan keharmonisan keluarga tidak memiliki hubungan dengan APK PAUD. Hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan APK PAUD tidak selalu bersifat linear sehingga tidak terdeteksi melalui uji korelasi yang telah dilakukan.

Berdasarkan temuan ini, pemerintah harus fokus dalam peningkatan dan penyediaan fasilitas sekolah PAUD, khususnya di daerah-daerah yang belum mencapai target satu desa satu PAUD. Aceh, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat dapat dijadikan target utama karena merupakan provinsi yang belum mencapai target tersebut. Akan tetapi, selain ketersediaan fasilitas, pemerintah juga perlu memikirkan terkait ketersediaan tenaga pendidiknya. Peningkatan transportasi menuju ke sekolah bagi anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah atau perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan masyarakat dengan sekolah juga perlu ditingkatkan. Papua dan Papua Barat

dapat dijadikan target utama karena memiliki persentase desa tertinggal lebih dari 50 persen sedangkan provinsi lain tidak mencapai angka tersebut.

Saran

Pemerintah dapat meningkatkan intervensi ketersediaan fasilitas PAUD dan akses menuju fasilitas PAUD untuk meningkatkan APK PAUD agar dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak. Intervensi dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program satu desa satu PAUD, khususnya pada wilayah yang belum mencapai target tersebut. Selain itu, perbaikan infrastruktur dan sarana transportasi umum di daerah-daerah perlu ditingkatkan untuk mempermudah akses pada berbagai sarana prasarana, khususnya sekolah PAUD.

Meskipun kondisi ekonomi, salah satu dari variabel struktur dominasi, dan struktur signifikansi tidak memiliki hubungan dengan APK PAUD, pemerintah tetap harus mempertimbangkan intervensi pada struktur ini. Anak-anak yang berada pada kemiskinan cenderung akan memiliki pendidikan dan tingkah laku yang kurang baik (Duncan dkk., 2012), pemerintah perlu terus melakukan intervensi melalui bantuan sosial pada keluarga yang masuk dalam kategori miskin. Walaupun dalam penelitian ini tidak terbukti pendidikan orang tua dan keharmonisan keluarga memiliki hubungan dengan APK PAUD, terdapat penelitian lain yang menunjukkan peran dari kedua variabel tersebut bagi perkembangan anak-anak (Barber & Buehler, 1996; Plavnicka dkk., 2024), sehingga pemerintah tetap perlu melakukan peningkatan pada pendidikan seluruh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pada berbagai hal termasuk pentingnya pendidikan usia dini dan melakukan berbagai penyuluhan atau sosialisasi untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Hasil uji yang menunjukkan tidak ada hubungan antara struktur signifikansi dan agensi (APK PAUD) dimungkinkan karena pemilihan indikator untuk mewakili variabel-variabel pada struktur ini yang kurang tepat. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih lanjut indikator yang dapat digunakan untuk mewakili berbagai variabel dalam struktur signifikansi. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menganalisis hubungan atau pengaruh struktur legitimasi terhadap APK PAUD. Penambahan struktur legitimasi pada penelitian selanjutnya akan memberikan analisis lebih dalam mengenai berbagai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah berkontribusi pada APK PAUD.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, F., Kusumawati, H., & Sumrahadi, S. (2022). Penyuluhan Dan Skrining Tumbuh Kembang Pada Anak Di Panti Asuhan YBKN Al-Hisyam Jakarta Selatan. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 5(5), Article 5. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i5.5755>
- Bappenas. (t.t.). GOAL 4. *SDGs Indonesia*. Diambil 18 Februari 2025, dari <https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-4/>
- Barber, B. K., & Buehler, C. (1996). Family Cohesion and Enmeshment: Different Constructs, Different Effects. *Journal of Marriage and Family*, 58(2), 433–441. <https://www.jstor.org/stable/353507>
- BPS. (2017). *Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. <https://kepri.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAwIzI=/angka-partisipasi-kasar--apk--pendidikan-anak-usia-dini--paud-.html>

- BPS. (2024). *Persentase Penduduk Miskin—Tabel Statistik—Badan Pusat Statistik Provinsi Kep. Riau*. <https://kepri.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzkjMg==/persentase-penduduk-miskin.html>
- BPS. (2024a, Februari 17). *Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2023*. <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/paud/230000/1>
- BPS. (2024, Februari 22). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1lwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>
- BPS. (2024b, Desember 2). *Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Provinsi*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQzOSMy/angka-partisipasi-kasar--apk--anak-yang-mengikuti-pendidikan-anak-usia-dini--paud--menurut-provinsi.html>
- BPS. (2025). *Persentase Penduduk Miskin (PO) Menurut Provinsi dan Daerah*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkylzl=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Britto, P. R., Lye, S. J., Proulx, K., Yousafzai, A. K., Matthews, S. G., Vaivada, T., Perez-Escamilla, R., Rao, N., Ip, P., Fernald, L. C. H., MacMillan, H., Hanson, M., Wachs, T. D., Yao, H., Yoshikawa, H., Cerezo, A., Leckman, J. F., & Bhutta, Z. A. (2017). Nurturing care: Promoting early childhood development. *The Lancet*, 389(10064), 91–102. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)31390-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31390-3)
- Clegg, S., & Cunha, M. P. e. (2019). *Management, Organizations and Contemporary Social Theory*. Taylor & Francis Group.
- Duncan, G. J., Magnuson, K., Kalil, A., & Ziol-Guest, K. (2012). The Importance of Early Childhood Poverty. *Social Indicators Research*, 108(1), 87–98. <https://doi.org/10.1007/s11205-011-9867-9>
- Dutot, V., Bergeron, F., & Calabrò, A. (2022). The impact of family harmony on family SMEs' performance: The mediating role of information technologies. *Journal of Family Business Management*, 12(4), 1131–1151. <https://doi.org/10.1108/JFBM-07-2021-0075>
- Eriani, E., & Yolanda, A. M. (2022). Analisis Angka Partisipasi PAUD Untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas di Provinsi Riau. *Mitra Ash-Shibyan: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1–16). <https://doi.org/10.46963/mash.v5i01.470>
- Handayani, O. D., & Rinaldi, A. N. (2024). Pengaruh Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun Terhadap Kesiapan Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.33369/jip.9.2.275-284>
- Kemendagri. (2023, September 12). *Data Kependudukan Berdasarkan Provinsi Per Juli 2023*. <https://e-database.kemendagri.go.id/kemendagri/dataset/1102/tabel-data>
- Kemendes. (2020, Mei 11). *Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal*. <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3261/ini-daerah-tertinggal-menurut-perpres>
- Kemendikdasmen. (2025). *Jumlah Satuan Pendidikan (PAUD) per Provinsi*. <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/paud>
- Kementerian Dalam Negeri. (2019, Agustus 29). *Pemerintah Dorong Program Satu PAUD Satu Desa*. <https://bangda.kemendagri.go.id/>
https://bangda.kemendagri.go.id/index.php/berita/baca_kontent/346/pemerintah_dorong_program_satu_paud_satu_desa

- Khairunnisa, K., Hartoyo, S., & Anggraeni, L. (2014). Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 15(1). <https://doi.org/10.21002/jepi.v15i1.05>
- Kusumawardhani, P. N. (2022). Spillover effects of investment in Early Childhood Education and Development (ECED) centers: Evidence from Indonesia. *Education Economics*, 30(6), 590–611. <https://doi.org/10.1080/09645292.2021.2019196>
- Mulia, P. S., & Kurniati, E. (2023). Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Pedesaan Indonesia. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 3663–3674. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i3.4628>
- Nakajima, N., Hasan, A., Jung, H., Brinkman, S., Pradhan, M., & Kinnell, A. (2019). Investing in school readiness: A comparison of different early childhood education pathways in rural Indonesia. *International Journal of Educational Development*, 69, 22–38. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2019.05.009>
- Paramita, P. P., Dr. Iyus Akhmad Haris, M. P., & Luh Indrayani, S. P. (2014). HUBUNGAN KONDISI EKONOMI DAN PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN DENGAN PARTISIPASI BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v4i1.1893>
- Plavnicka, J., Chovan, S., & Bobakova, D. F. (2024). Understanding the Impact of Socioeconomic Factors on Early Childhood Development in Marginalised Roma Communities: The Role of Parental Education and Household Equipment. *Children*, 11(6). <https://doi.org/10.3390/children11060622>
- Rasyid, A. (2015). PARTISIPASI ORANGTUA DALAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI DESA MALIMONGENG KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN BONE. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 2(2), 10–15. <https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v2i2.2538>
- Rohmani, N. (2021). Analisis Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Seluruh Indonesia. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 625–632. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.262>
- Sedgwick, P. (2014). Spearman's rank correlation coefficient. *BMJ: British Medical Journal (Online)*, 349. <https://doi.org/10.1136/bmj.g7327>
- Supartini, U., Dhieni, N., & Hartati, S. (2024). Pentingnya Melatih Kecakapan Hidup Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.33369/jip.9.2.227-237>
- Takerubun, C., & Marsino, W. (2021). Pengaruh Faktor Keluarga Terhadap Partisipasi pendidikan Anak usia Dini di Papua Barat. *Seminar Nasional Official Statistics, 2020(1)*, 638–650. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.460>